



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 10 (Sepuluh)
Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI.
Hari, Tanggal	: Senin, 1 April 2024
Pukul	: 13.30 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka.
Pimpinan Rapat	: Mohamad Hekal, M.B.A/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Pembahasan Mengenai Progress Realisasi Investasi Tahun 2023.
Hadir	: 1. 29 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Bapak Bahliil Lahadalia; Beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI pada Pukul 14.09 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 1 April 2024, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bapak Mohamad Hekal, M.B.A.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi capaian Kementerian Investasi / BKPM RI dalam realisasi investasi tahun 2023 yang berhasil melampaui angka investasi yang ditargetkan.
2. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Investasi / BKPM RI agar lebih memprioritaskan investasi yang dapat memberi kemanfaatan besar bagi penciptaan lapangan kerja, UMKM, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
3. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi / BKPM RI untuk lebih rinci dalam menyampaikan data investasi, terkait sektor dan distribusi investasi di Jawa dan Luar Jawa.
4. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi / BKPM RI untuk memberikan data yang jelas dan detail terkait investasi dan investor di IKN.
5. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi / BKPM RI untuk menyampaikan laporan detail terkait kinerja Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.
6. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Investasi / BKPM RI untuk turut aktif dalam mencegah dan memberantas praktek-praktek mafia di sektor pertambangan.
7. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Investasi / BKPM RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada Pukul 16.25 WIB.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM RI

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**MOHAMAD HEKAL, M.B.A
A-103**